VISITASI KUNJUNGAN KE KABUPATEN BOJONEGORO

KELOMPOK IV | PENDAMPING : Dr. P. MARPAUNG, MSc.

KETUA

Dr. Indra Murty Surbakti, MA. (NDH 7)

SEKRETARIS

Sri Dewi Rahmawati Nani, SH,MH. (NDH 13)

ANGGOTA

Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, SH, MH, MKn. (NDH 59)
Ir. Yosef Dwi Sigit Purnomo, MSi. (NDH 01)
Noer Isrodin Muchlisin, SPd, MM. (NDH 08)
Fadly Achmad, S.Sos, MM. (NDH 16)
Dasrianto Putra, S.Sos, MSi. (NDH 19)
Indra Gunawan, SE, MPA. (NDH 27)
Hani Syopiar Rustam, SH. (NDH 30)
Drs. Yusra , MPd. (NDH 31)
Irwan Sinaga, MA, Ph.D (NDH 34)
Wahyudi Indrayana SP, MM. (NDH 40)
Dr. H.Ahmad Yani, SPd, MM,.MBA. (NDH 46)
Mursalim , AP,.MSi. (NDH 50)
Dr. Adin Bondar, MSi. (NDH 55)

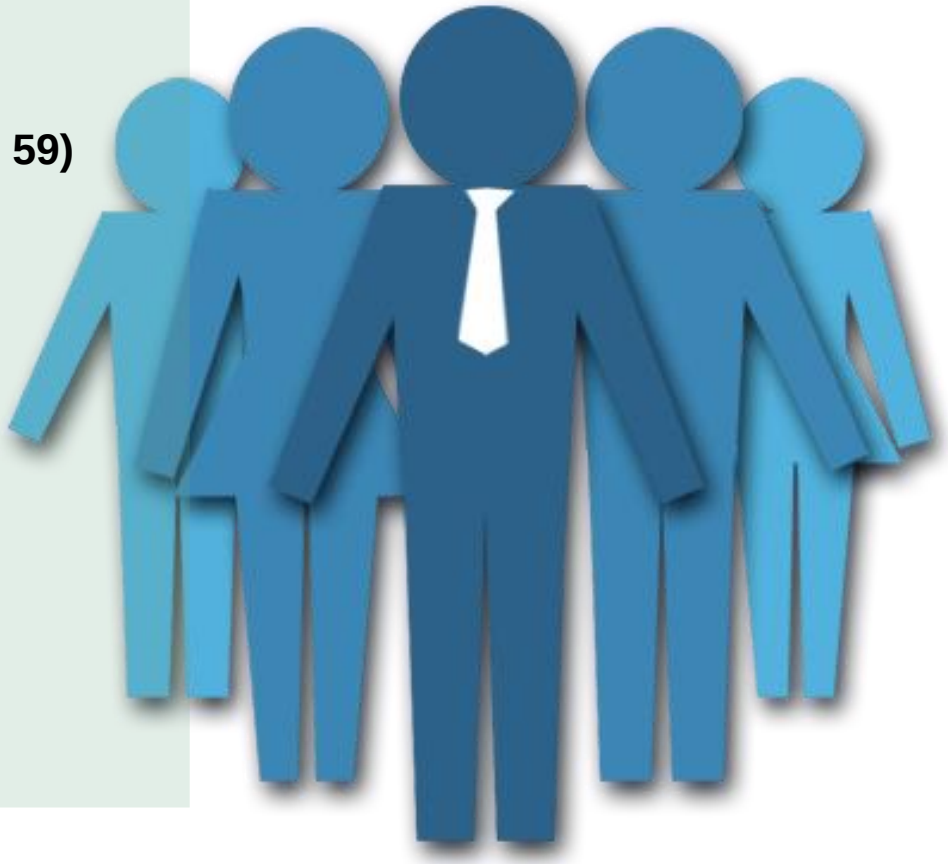

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

- **TEMA** “Membangun Kompetensi SDM Menuju *Smart Government”*.
- keberhasilanmenerapkan *Open Government Partnership* sebagai bagian dari penerapan *good governance*.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan pemanfaatan teknologi untuk keterbukaan informasi keuangan dan program pemerintah kepada masyarakat luas.
- *Open Government Partnership (OGP)* telah terlaksana untuk reformasi birokrasi, dengan tujuan pemerintah yang lebih transparansi dan akuntabel

SMART GOVERNMENT

Membangun Kompetensi SDM Menuju *Smart Government*

Smart Government

Pemerintahan yang berbasis digital, dan dijalankan oleh ASN yang profesional, sehingga pemerintahan mampu berjalan dinamis, selalu dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan kondisi.

ASN Profesional

Untuk mewujudkan smart government, diperlukan ASN yang profesional, yang memiliki: karakter kepemimpinan digital, literasi digital yang tinggi, kompetensi yang tinggi di bidang tugasnya, karakter inovatif, keterbukaan dan kemampuan untuk terus belajar, daya adaptasi yang tinggi, penguasaan bahasa internasional, kapasitas kewirausahaan, integritas dan nasionalisme yang tinggi

Strategi Open Government Partnership di Kab. Bojonegoro

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

1. Salah satu kota dari Gerakan Menuju 100 Smart City 2017
2. Best of Smart Society 2019
3. Top Leader on Digital Implementation 2020
4. Top Digital Transformation Readiness 2020
5. Top Digital Implementation 2020 on District Government Pemkab Bojonegoro Level Stars

TUJUAN VKN

1. Aktualisasi kepemimpinan strategis dan manajemen strategis
2. Sarana sharing inovasi dengan Pemkab Bojonegoro.
3. Menumbuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi pembangunan SDM
4. Menyampaikan kesimpulan, rekomendasi dan saran kepada Pemerintah

BENEFITS

1. Memberikan pengalaman belajar bagi peserta PKN TK II dalam mengaktualisaskan integritas kepemimpinan, kepemimpinan strategis, dan manajemen strategis dalam praktek di lapangan.
2. Memberikan masukan, saran, dan rekomendasi untuk mendorong semakin terwujudnya smart government.
3. Lesson learned dalam pengembangan smart government.

HASIL YANG DIHARAPKAN

Melalui agenda visitasi kepemimpinan nasional ke Bojonegoro, peserta PKN II dapat mempelajari aktualisasi pada lokus visitasi, membandingkan pembelajaran yang diperoleh dengan praktik pada lokus, merumuskan lesson learned dan strategi pengembangan potensi dan strategi memecahkan permasalahan.

JADWAL VKN

Melalui agenda visitasi kepemimpinan nasional ke Bojonegoro, peserta PKN II dapat mempelajari aktualisasi pada lokus visitasi, membandingkan pembelajaran yang diperoleh dengan praktik pada lokus, merumuskan lesson learned dan strategi pengembangan potensi dan strategi memecahkan permasalahan.

STRATEGI PENGEMBANGAN SMART GOVERNMENT

#1

KEBIJAKAN

1. UU No 5 Tahun 2014 mengatur manajemen ASN yang diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.
2. UU 23 Tahun 2014 mengatur agar Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Perpres 95 Tahun 2018 mengatur Pemerintah Daerah dalam percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tentang assesmen diri yang dilakukan oleh seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah terhadap kematangan SPBE.

|STRATEGI PENGEMBANGAN SMART GOVERNMENT

#2

REGULASI

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Dalam upaya membangun smart government, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkan kebijakan :

1. **Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMN)**
2. **Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Masterplan Smart City Bojonegoro 2019-2023.**

SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE

INDEKS SPBE NASIONAL

Deskripsi	Indeks SPBE 2018	Indeks SPBE 2019	Peningkatan
Penerapan SPBE Nasional	1,98 (Cukup)	2,18 (Cukup)	0,20
Penerapan SPBE Instansi Pusat (Kementerian/LPNK/Lembaga Negara)	2,80 (Baik)	2,97 (Baik)	0,17
Penerapan SPBE Pemda	1,87 (Cukup)	2,07 (Cukup)	0,20

- Kegiatan Evaluasi SPBE dilakukan kepada 637 K/L/D Indeks SPBE Nasional Tahun 2019 adalah 2,18 dengan predikat "**Cukup**".
- Indeks SPBE Nasional menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada level 2 yaitu penerapan SPBE di K/L/D dilaksanakan secara sendiri- sendiri (silo) dan belum dilakukan kolaborasi/integrasi antar K/L/D.

Distribusi Predikat diatas Baik berdasarkan Jenis Kelembagaan

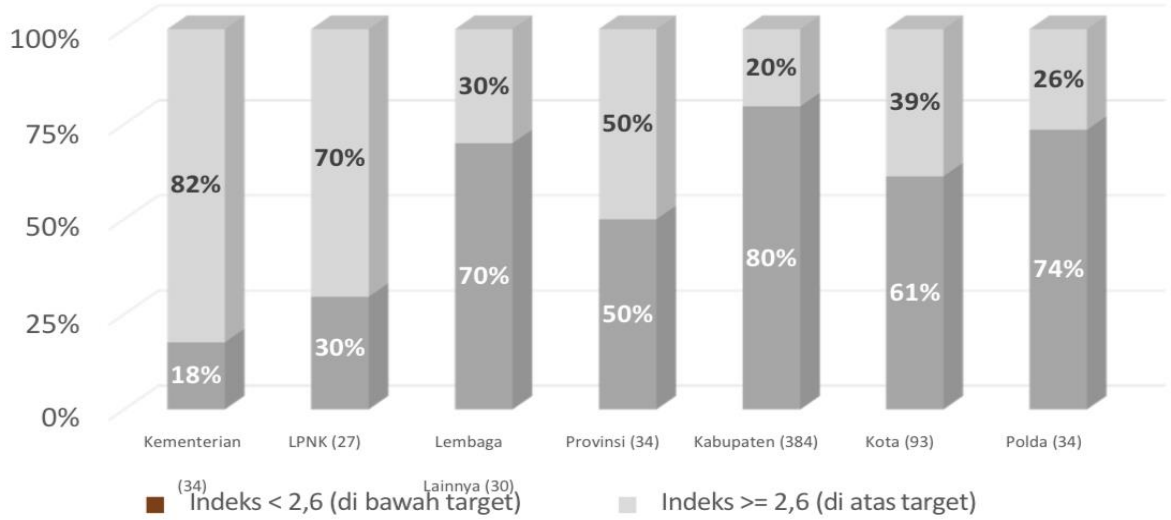

REKOMENDASI TRANSFORMASI DIGITAL:

1. Penguatan Tata Kelola SPBE yang terpandu di K/L/D
2. Pengembangan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang terpadu
3. Pengembangan infrastruktur TIK yang terintegrasi dan dimanfaatkan secara bersama antar K/L/D
4. Peningkatan kapasitas SDM SPBE dalam hal kepemimpinan yang kolaboratif dan inovatif

STRATEGI PENGEMBANGAN SMART GOVERNMENT

KELEMBAGAAN

1. Pemkab Bojonegoro membentuk Dewan Smart City Daerah dan Tim Pelaksana Smart City Daerah
2. Pemberdayaan organisasi masyarakat antara lain Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Perguruan Tinggi, forum swadaya masyarakat atau NGO pendukung smart city, dan partisipasi pakar dalam Dewan Smart City Daerah.

STRATEGI PENGEMBANGAN SMART GOVERNMENT

INFRASTRUKTUR

1. Membangun akses internet dan inter koneksi seluruh OPD
2. Jaringan fiber optic di 28 kecamatan, 11 kelurahan dan 419 desa,
3. Memasang jaringan antena bagi desa-desa di daerah blankspot
4. Membangun Gedung command center
5. Media senter
6. Videotron untuk desiminasi informasi seluruh kebijakan dan capaian pembangunan Bojonegoro.

STRATEGI PENGEMBANGAN SMART GOVERNMENT

APLIKASI. Memiliki 105 aplikasi pelayanan umum dan pelayanan ASN yang terintegrasi, antara lain:

1. **Smart government.** Penerapan teknologi berbasis TI untuk perencanaan daerah, anggaran daerah, kinerja pemerintah, evaluasi kinerja, rencana pengadaan, pengadaan barang dan jasa, absensi pegawai, layanan surat, informasi hukum dan website desa;
2. **Smart Branding.** Penerapan TI untuk layanan pengaduan masyarakat, media sosial dan Laporan SOP;
3. **Smart economy.** Informasi harga pasar dan informasi produk daerah;
4. **Smart Living.** Portal Polres Bojonegoro, Aplikasi MADRIM (Multi Application Digital Integrated System) yang merupakan kumpulan aplikasi terintegrasi guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat) dan CCTV Bojonegoro;
5. **Smart Society.** Informasi lowongan kerja, Layanan RSUD Bojonegoro, Aplikasi e-health, dan Forum Radio Bojonegoro;
6. **Smart Environment.** Layanan pemadan kebakaran, informasi tanam dan panen, dan informasi lalin.
7. **Smart ASN.** SIMASBRO sebagai pelayanan satu pintu dan satu data pengelolaan masnajemen ASN.
8. **Satu Data.** Pembangunan Portal Big Data Bojonegoro.

STRATEGI PENGEMBANGAN SMART GOVERNMENT

BEST PRACTICE

Implementasi good governance sebagai organisasi yang adaptif dan agile telah ditunjukkan oleh Kabupaten Bojonegoro sehingga meraih berbagai penghargaan baik skala nasional dan internasional, antara lain :

1. **Gerakan Menuju 100 Smart City 2017**
2. **Best of Smart Society 2019**
3. **Top Leader on Digital Implementation 2020**
4. **Top Digital Transformation Readiness 2020**
5. **Top Implementation 2020 on District Government Pemkab Bojonegoro Level Stars 4**

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Pemkab Bojonegoro menuju Smart Government menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bojonegoro (Simasbro) yang mencakup

- e-pension
- e-kp
- e-kinerja
- e-cuti
- e-personal
- e-mutasi

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

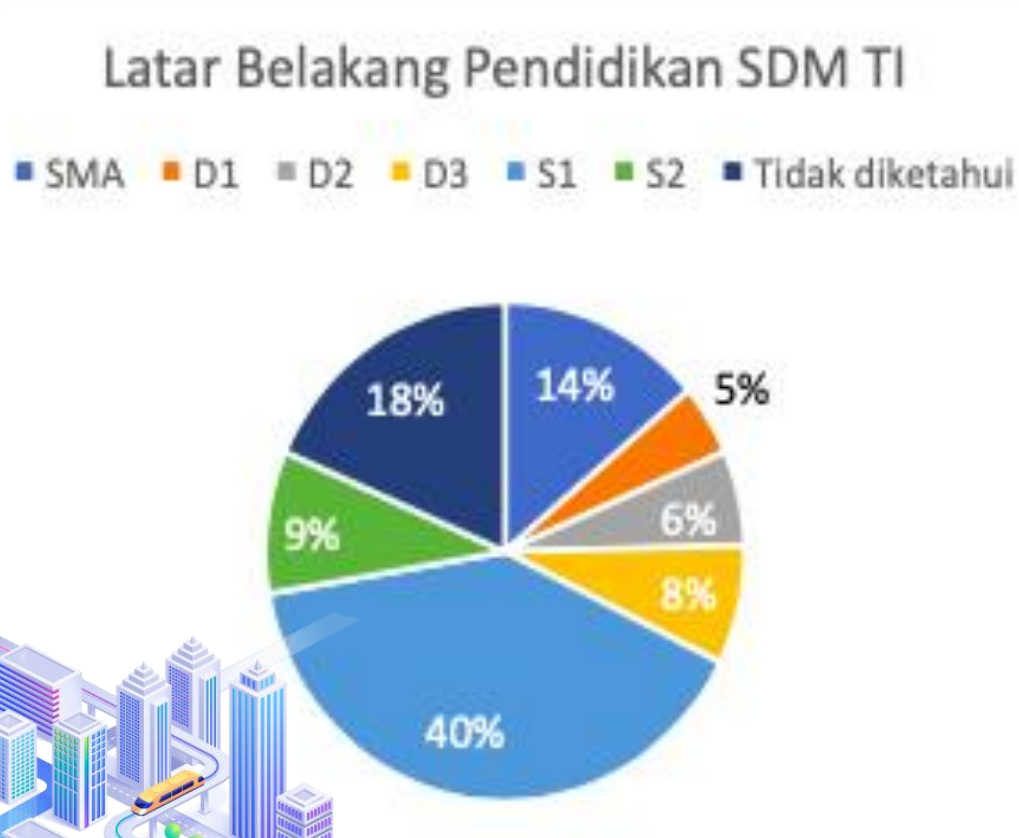

Tantangan ketersediaan SDM untuk *smart government* adalah keterbatasan jumlah pegawai berlatar belakang pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika.

Lesson Learned

1. Mengembangkan kebijakan yang terpadu.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengintegrasikan pelayanan berbasis digital.
4. Memberdayakan SDM untuk menggunakan TIK.
5. Melakukan regenerasi ASN secara terencana dan bertahap untuk mengatasi kekurangan/keterbatasan SDM yang ada.
6. Mengembangkan masyarakat atau sumber daya manusia di luar ASN.
7. Terus melanjutkan pembangunan dan komitmen untuk ASN dan Non ASN.
8. Meningkatkan SDM dengan cara pelatihan, workshop, diklat, dan merekrut tenaga muda milenial di luar ASN untuk membangun aplikasi yang mendukung pelayanan masyarakat.
9. Membangun jejaring dalam upaya membangun aplikasi smart government dengan swasta dan masyarakat.
10. Melakukan implementasi kebijakan nasional didukung oleh komitmen dari Pemkab dan masyarakat yang berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.

Lesson Learned

A. Analisis Pembelajaran PKN II dengan VKN Bojonegoro

1. Dialog Strategis
2. Organisasi yang adaptif dan agile
3. Organisasi pembelajar
4. Strategi Marketing

B. Review Kebijakan

1. Merit Sistem
2. Talent Pool
3. Intensive Pegawai
4. Pemberdayaan Generasi Milenial
5. Regenerasi SDM
6. Pelaksanaan Diklat
7. Jenjang Karier
8. Remunerasi dan Bonus Kinerja sebagai insentif
9. Anggaran yang cost efective untuk pemanfaatan TIK

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Dialog Strategis
2. Organisasi yang adaptif dan agile
3. Organisasi pembelajar
4. Strategi Marketing

CAKUPAN USULAN ALTERNATIF STRATEGI KEBIJAKAN

1. Infrastruktur
2. Regulasi
3. SDM
4. Anggaran

SARAN - REKOMENDASI

INFRASTRUKTUR

1. Akses Pendidikan dan Keterampilan IT
2. Pengembangan Budaya Literasi
3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

PEMBERDAYAAN SDM

4. Pemberdayaan Generasi Muda (Millenial) secara Optimal
   a. Inovasi Kebijakan
   b. Sharing Knowledge
   c. Akses kesempatan
   d. Tugas-tugas strategis dan Kaderisasi
   e. Diklat yang tidak konvensional

REGULASI

5. Inovasi Merit Sistem dan Insentif pegawai
6. Revisi Penilaian Laporan Kinerja
7. Gagasan Pengembangan jenjang karier fast track
8. Renumerasi dan bonus kinerja sebagai insentif
9. Alokasi Biaya Pengembangan Aplikasi yang cost efektif

FOTO SEBAGAI DOKUMENTASI VKN
KABUPATEN BOJONEGORO KELOMPOK IV
HARI RABU 14 APRIL 2021

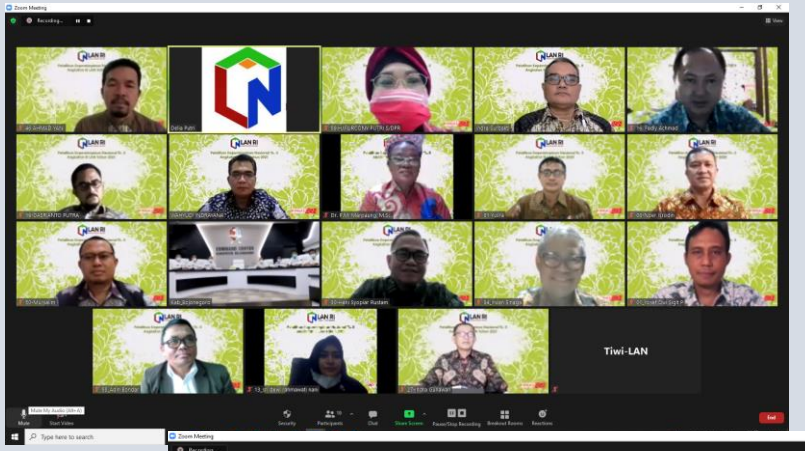

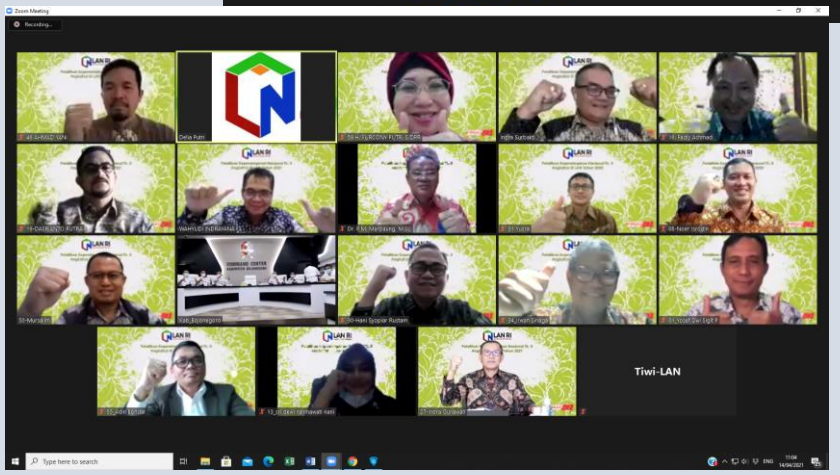

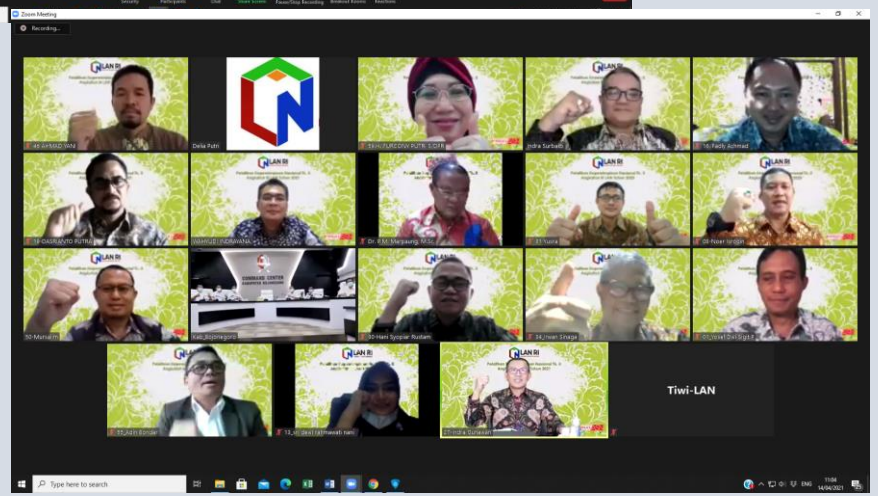
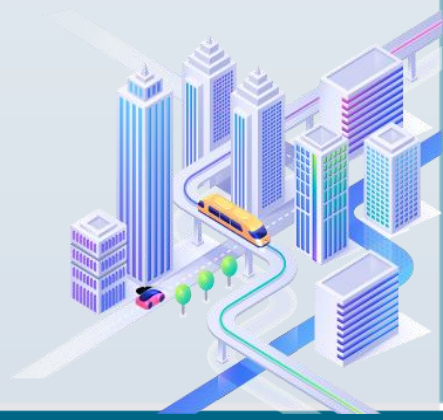
TERIMA KASIH